



PENGARUH PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT SEKITAR HKm SOLOK RADJO DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

Fahila Fitriani¹, Sri Mariya²

Program Studi Geografi, Departemen Geografi FIS Universitas Negeri Padang

Email: ffahila77@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melihat pengetahuan masyarakat mengenai Perhutanan Sosial dan menganalisis pengaruh pemberian izin perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat di sekitar Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Dengan penggunaan *mix methods* serta penyebaran kuisioner kepada 45 responden. Teknik pengumpulan data observasi dan kuisioner untuk mengukur pengetahuan masyarakat dengan skala guttman serta analisis deksirptif setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, membandingkan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial menggunakan *Paired Sample T Test*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai perhutanan sosial yaitu 44.8% sedangkan responden memiliki tingkat pengetahuan baik hanya 17.8% dan responden memiliki pengetahuan cukup dan 37.8% responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perhutanan sosial terbukti memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar HKm Solok Radjo dengan meningkatnya pendapatan setelah adanya perhutanan sosial ini dan dari hasil uji *Paired Sample T Test* memiliki t-hitung > t-tabel, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu $5.117 > 2.015$.

Kata kunci: Perhutanan Sosial; Hutan kemasyarakatan; Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to look at community knowledge about Social Forestry and analyze the effect of granting social forestry permits on the income of communities around Community Forests in the Lembah Gumanti District, Solok Regency. With the use of *mix methods* and the distribution of questionnaires to 45 respondents. Observation data collection techniques and questionnaires to measure community knowledge on a guttman scale as well as descriptive analysis after validity and reliability tests, comparing people's income before and after social forestry using *the Paired Sample T Test*. The results showed that the level of public knowledge was still lacking regarding social forestry, namely 44.8% while respondents had a good knowledge level of only 17.8% and respondents had sufficient knowledge and 37.8% of respondents. The results showed that the social forestry program was proven to have an impact on the income of the community around HKm Solok Radjo with an increase in income after this social forestry and from the results of the *Paired Sample T Test* test had a t-count > t-table, so that H_0 was rejected and H_a was accepted, namely $5,117 > 2,015$.

Keywords: *Social Forestry; Community forestry; Income*

¹Mahasiswa Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Hutan Indonesia merupakan sumber daya penting yang sangat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan dan akses yang adil terhadap sumber daya hutan harus diwujudkan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut dengan partisipasi penuh dari semua lapisan masyarakat. Ini akan memberi semua elemen masyarakat kekuatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan memberdayakan mereka (Nurofiq, Prihanto, & dkk, 2020).

Hutan dianggap ekosistem karena hubungan erat antara flora dan satwa liar yang membentuk hutan dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu, hutan yang dianggap sebagai ekosistem dapat dipelajari dari perspektif autoekologi dan sinekologi (Soerianegara dkk, 1982).

Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat untuk membangun kapasitas mereka dan memberi mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan dengan cara yang adil, ramah lingkungan, dan membantu mereka mencapai keamanan dan ketahanan sosial dan ekonomi terhadap ancaman eksternal.

Program yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam perhutanan sosial antara lain inisiatif pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan masyarakat, pengembangan ekonomi klaster dan rantai nilai, peningkatan produktivitas, pemberian kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat, dan pencegahan sengketa pengelolaan sumber daya alam. sumber daya. (Nurofiq, Prihanto, & dkk, 2020).

Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan juga Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial kegiatan pengusulan perizinan dapat dilakukan dan diproses sehingga akan ada pemanfaatan Hutan yaitu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Selain itu, Kebijakan Perhutanan Sosial harus dapat disesuaikan dengan kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik lokasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memiliki karakteristik yang beragam. Untuk memastikan bahwa skema Perhutanan Sosial yang dipilih kompatibel dengan karakteristik sosial-ekologis setempat, masyarakat harus dibagi menjadi beberapa tipologi. (Ekawati, Suharti, & Anwar, 2020)

Selain itu, Program Perhutanan Sosial diharapkan dapat membantu pencapaian pengelolaan hutan lestari, pengurangan kesenjangan antara kota dan desa, penyelesaian sengketa penguasaan lahan, dan peningkatan ketahanan pangan dan iklim. (Supriyanto, 2019).

Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan program PHBM melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan kemitraan dengan Hutan Rakyat (HR), HKm dan HD yang dapat dikembangkan pada hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak dan diperuntukkan bagi masyarakat yang punya ketergantungan dengan hutan (Sari dkk, 2019)

Dari lima program Perhutanan Sosial yang ada saat ini, Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu yang tertua.

Program HKm merupakan inisiatif pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengelola hutan tersebut, serta kesempatan dan kepercayaan bagi masyarakat tersebut untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mengelola sumber daya hutan secara penuh guna mencapai kesejahteraan masyarakat di masa depan dengan terus menerus menitikberatkan pada upaya pelestarian hutan. (Erdi, 2011 dalam Muhdar dkk, 2019)

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraannya melalui penyebaran kapasitas dan pemberian akses dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga Pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Wiranto, 2014)

Penelitian Ini bertujuan untuk melihat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dan juga menganalisis pengaruh pemberian izin Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan memberikan dampak pada pendapatan masyarakat sekitar HKm Solok Radjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dari hutan kemasyarakatan. Batas eror penelitian yang digunakan dalam pengambilan sample menggunakan rumus slovin yaitu 15%. Penelitian ini berjalan dengan sampel 45

responden yang termasuk dari anggota hutan kemasyarakatan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *mix method* atau penelitian kombinasi. Dengan teknik pengumpulan data observasi ke lapangan dan juga penyebaran kuisioner. Untuk mengetahui serta mengukur pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan perhutanan sosial yaitu menggunakan skala guttman (Sugiyono, 2014) yang kemudian dijelaskan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari kuisioner yang telah di jawab oleh responden dihitung frekuensi dan persentasenya kemudian di kategorikan kedalam tingkat pengetahuan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Baik : 76% - 100%
- b. Pengetahuan Cukup : 56% -75%
- c. Pengetahuan Kurang : < 56%

Untuk melihat bagaimana dampak dari adanya perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat sekitar HKm Solok Radjo digunakan uji *Paired Sample T Test*. Dengan membandingkan pendapatan masyarakat sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial. Dengan Menurut Pramana dalam Martika (2015), pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sign (2-tailed) < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika nilai sign (2-tailed) > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil dan Pembahasan:

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan perhutanan sosial

Masyarakat sekitar lebih mengenal HKm Solok radjo dengan Koperasi Solok Radjo. Tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai perhutanan sosial. Tingka pengetahuan masyarakat didapatkan dengan data kuisioner yang diisi oleh 45 responden.

Tabel 1. Tingkat pengetahuan per indikator

No	Indikator	No. Pernyataan	Persentase	Tingkat Pengetahuan
1	Hutan	1-4	52.2	Kurang
2	Perhutanan Sosial	5-13	59.8	Cukup
3	HKm	14-20	49.2	Kurang
4	Pendapatan	21-24	50.5	Kurang
Total			52.9	Kurang

Sumber: Hasil pengolahan data primer penulis,2022

Berdasarkan tabel 1 nilai dari empat indikator tidak ada yang mencapai baik. Dapat dikatakan baik jika persentase mencapai 76% - 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan Perhutanan Sosial di Wilayah Kenagarian Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti dalam kategori kurang.

Pada penelitian ini, jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik persentasenya 17.8% dengan jumlah 8 responden.

Tabel 2. Tingkat pengetahuan responden

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	8	17.8
Cukup	17	37.8
Kurang	20	44.4
	45	100.0

Sumber: Hasil pengolahan data primer penulis,2022

Dengan tingkat pengetahuan responden pada penelitian ini termasuk dalam kategori kurang, pengetahuan perhutanan sosial masih perlu ditingkatkan agar masyarakat

dapat mengerti dan paham tentang perhutanan sosial yang terdapat disekitarnya.

Pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Semakin banyaknya informasi yang diterima, semakin mudah dan cepat bagi seseorang untuk memperbarui pengetahuannya dan membentuk landasan kognitif yang utuh mengenai suatu hal.(Widayati, 2012).

Selain dari faktor pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan mengenai perhutanan sosial ini sebaiknya lebih digiatkan untuk membuat masyarakat paham tentang tujuan dan manfaat dari adanya hutan kemasyarakatan disekitarnya sebagaimana maksud dan tujuan dari Perhutanan Sosial yang tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yaitu dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial. Dan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan maka perlu adanya kegiatan penyuluhan mengenai perhutanan sosial berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Bab 1 Ayat 4 menyatakan bahwa Penyuluhan Kehutanan adalah proses

pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan tujuan dari pengadaaan penyuluhan kehutanan diatur dalam UUD 1945 Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 56 yaitu Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Analisis pengaruh perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat sekitar HKm Solok Radjo

Untuk melihat rata-rata pendapatan sebelum adanya perhutanan sosial dan setelah adanya perhutanan sosial dengan menggunakan *Paired Sample T-Test* dengan jumlah responden 45 orang.

Tabel 3. Tabel Hasil *Paired Sample T-Test*

No	<i>Paired Sample T Test</i>	Nilai	Jumlah Responden
1	<i>Paired Sample Statistic</i>		
	Rata - rata Sebelum	1682222	45
	Rata - rata Sesudah	2367777	
2	<i>Paired Samples Correlations</i>		
	Korelasi	0.672	45
	Signifikan	0	
3	<i>Paired Sample Test</i>		
	T	-5.117	45

Df	44
Sig(2-tailed)	0

Sumber: Hasil pengolahan data primer penulis dengan IBM SPSS,2022

Berdasarkan tabel 3 hasil dari *Paired Samples Statistics* yaitu rata-rata pendapatan masyarakat sebelum adanya perhutana sosial yaitu sebesar Rp1.682.222 sedangkan untuk rata-rata pendapatan setelah adanya perhutana sosial yaitu sebesar Rp2.367.777, dengan demikian pendapatan sebelum adanya perhutana sosial lebih kecil jika dibandingkan dengan setelah adanya perhutanan sosial. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan Solok Radjo.

Pada *Paired Samples Correlations* di tabel 11, dapat dilihat hasil dari uji korelasi antara pendapatan sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial, dengan nilai koefien korelasi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel sebelum dan setelah adanya program perhutanan sosial.

Untuk melihat adanya dampak dari program perhutana sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo adalah dengan *Paired Sample Test*. Pada tabel 5 nilai signifikansi (2 tailed) adalah 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya program perhutanan sosial memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat hutan kemasyarakatan Solok Radjo. Dampaknya juga dapat dilihat dari negatifnya nilai t hitung dikarenakan nilai rata-rata pendapatan masyarakat lebih kecil sebelum adanya perhutana sosial dibandingkan setelah adanya perhutanan sosial yaitu -5.117 yang berarti pendapatan

masyarakat sebekum adanya perhutanan sosial lebih rendah dan mengalami peningkatan setelah adanya program perhutanan sosial. Nilai t hitung negatif pada penelitian ini dapat bermakna positif. Jadi nilai t hitung mejadi 5.117 dan nilai t tabel 2.0153. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak program perhutanan sosial terhdapa pendapatan masyarakat Hutan Kemasyarakatan Solok Radjo.

Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan perhutanan sosial memberikan dampak dan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan responden mengalami kenaikan, ini menunjukkan angka pendapatan kelompok mengalami kenaikan lebih dari penghasilan awal mereka. Tingkat kenaikan pendapatan merupakan dampak positif dari Program HKm sesuai dengan harapan pemerintah. Temuan dari penelitian ini searah dengan penelitian tentang Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh Ahmad Nopan Martapani dkk, pada tahun 2021 yang menegaskan bahwa tujuan perhutanan sosial agar dapat memperbaiki sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan seperti perbaikan akses sarana dan prasarana untuk desa maupun untuk kehidupan masyarakatnya sehingga masyarakat dapat menghasilkan produk dari hutan untuk dijual di pasaran. Sedangkan, dalam jangka panjang, perhutanan sosial dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat menyerap pekerja dengan banyaknya sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang dapat dijual hingga mancanegara.

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat memberikan

kesejahteraan dimana Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi sesuai dengan pendapat para ahli dari aliran teori strukturalis.

Simpulan:

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan (HKm) Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan indikator mengenai hutan, perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, dan pendapatan memiliki rata-rata 52.9% dan termasuk dalam kategori kurang. Dengan 44% masyarakat dengan tingkat pengetahuan kurang.
2. Berdasarkan hasil Paired Sample T Test atau uji t berpasangan, H_0 ditolak dan H_a diterima, maka hasil yang ditemukan adalah nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu $5.117 > 2.015$ dapat disimpulkan bahwa program perhutanan sosial memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat sekitar hutan kemasyarakatan Solok Radjo di Kenagarian Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan lebih giatnya penyuluhan mengenai perhutanan sosial kepada masyarakat, agar masyarakat dapat

melestarikan sekaligus memanfaatkan hutan dengan melihat nilai ekonomi yang ada tanpa merusak hutan

Untuk penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan studi pendahuluan untuk mengembangkan penelitian dengan topik yang sama.

Daftar Rujukan

- Ekawati, S., Suharti, S., & Anwar, S. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*. Bogor: IPB Press.
- Martika, Lia Dwi. 2015. *Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum dan Setelah Penerapan Kebijakan Office Chanelling*. Jurnal JRKA Volume 1 Issue 2 tahun 2015
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). *Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus: masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi*. Jurnal Rimba Lestari, 42.
- Nurofiq, H. F., Prihanto, K. B., & dkk. (2020). *The State of Indonesia's Forests 2020*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia.
- Republik Indoneisa, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial*.
- Republik Indoneisa, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan* Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Sari, Y., Senoaji, G., & Suharyato, H. (2019). *Efektivitas Program Perhutanan Sosial Dalam Bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu*. Naturalis-Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Volume 8 No 1, 90-91.
- Soerianegara, I dan A. Indrawan. (1982). *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: Departemen. Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2019). *Inovasi kebijakan Perhutanan Sosial untuk keadilan pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Kehutanan ke-5 Universitas Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Tulusan, F. M., & Londa, V. Y. (2014). *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. LPPM Bidang EkoSosBudKum, 93.
- Widayati, A., Suryawati, S., Crespigny, C. de, & Hiller, J. E., (2012). *Knowledge and Beliefs about Antibiotics Among*

People in Yogyakarta City Indonesia : a Cross Sectional Population-Based Survey. Aricjournal, 1(38), 1–7

1. Wiranto. (2014). *Hutan Untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di*

Sektor Kehutanan. (I. Hakim, & L. R. Wibowo, Eds.) Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.